

Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Medan Estate

Dipo Piswatama

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis: ddipopiswatama@gmail.com

Julia Ivanna

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

Email: juliaivanna@unimed.ac.id

Abstract. *Community perception of the performance of village government in Medan Estate village means that the author focuses the research in this article on looking at the extent of the performance of village government in Medan Estate village. The aim of this research is to determine the performance of village government in Medan Estate village. This type of research is qualitative. Qualitative research methods focus on interviewing other people in external and complex environments. (Moleong, 1999; Creswell, 2002, Lindloft, 1995), states that qualitative research methods are more inductive. This means that the research step that must be prioritized is data based on facts, symptoms, phenomena, reality which is the theme, then processed, processed, so that at the end of the research it can become a proposition, model or even theory. The solution to this problem is that the president must have supervisors in the village government such as the TNI, police and PPKn lecturer experts to select which members of the village apparatus are not suitable for use or use. And this aims to ensure that people who are on the inside route are not worthy of getting a job, must be smart, wise, competent people who are worthy of being village officials. And the results of village government performance are increasingly advanced and evenly distributed.*

Keywords: *Community, Performance, Village Government.*

Abstrak. Persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa di desa Medan Estate artinya penulis memfokuskan ke penelitian artikel ini melihat sejauh mana kinerja pemerintahan desa di desa Medan Estate. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pemerintahan desa di desa Medan Estate. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah berfokus pada mewawancarai orang lain di lingkungan luar dan kompleks. (Moleong, 1999; Creswell, 2002, Lindloft, 1995), menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif lebih bersifat induktif. Artinya langkah penelitian yang harus didahulukan adalah data berdasarkan fakta, gejala, fenomena, realitas yang menjadi tema, kemudian diolah, diproses, sehingga akhir penelitian dapat menjadi proposisi, model atau bahkan teori. Solusi dari permasalahan tersebut adalah bapak presiden harus mempunyai pengawas dipemerintahan desa seperti adanya TNI, polisi dan pakar dosen PPKn untuk menyeleksi anggota perangkat desa mana yang tidak layak dipakai atau digunakan. Dan hal ini bertujuan agar orang-orang yang jalur orang dalam tidak layak dapat pekerjaan, harus orang-orang yang pintar, bijak, berkompetensi yang layak menjadi perangkat desa. Dan hasil kinerja pemerintahan desa semakin maju dan merata.

Kata Kunci: Masyarakat, Kinerja, Pemerintahan Desa.

PENDAHULUAN

Rakyat yang menjadi kekuasaan tertinggi disuatu negara mempunyai ham untuk mengkritik sebuah negara menjadi negara yang lebih baik lagi. Seperti kasus ketua BEM UGM yang bernama Gielbran Muhammad Noor yang dimana saudara gielbran berpendapat demokrasi dan di Indonesia semakin punah dan adanya politik dinasti yang diterapkan oleh bapak Jokowi Widodo. Dan gielbran memberikan pernyataan bahwasannya bapak Presiden

Jokowi Widodo sebagai alumni UGM (Universitas Gadjah Mada) terburuk. Permasalahan tersebut sudah termasuk persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam ruang lingkup skala besar. Abraham Lincoln menyebutkan “*democrasi is government of the people, by the people, and for the people*” atau diterjemahkan sebagai demokrasi adalah pemerintah dari rakyat , oleh rakyat dan untuk rakyat.

IKN (Ibu Kota Nusantara) yang sudah resmi menjadi Ibu kota Indonesia yang pada tanggal 17 agustus 2024. Dan IKN kalimantan berada di dua kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Usulan perpindahan ibu kota Indonesia yang baru sudah terjadi pada masa pemerintahan presiden Soekarno yang berada di Palangkaraya. Dan akhirnya bapak Soekarno tetap menjadikan kota Jakarta menjadikan ibu kota negara Indonesia pada tahun 17 juli 1957. Dan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah merencanakan perpindahan ibu kota, dikarenakan ibu kota Jakarta sering terjadinya banjir yang skala jangka panjang dan kemacetan 33 menit 40 detik. Dan inilah menjadikan sebuah masalah besar ibu kota Indonesia harus segera dipindahkan di IKN kalimantan. Al-Qur’an surat Ali Imran ayat 159 menjelaskan bahwa manusia diajarkan untuk mencari tahu atau bertawakkal dalam memecahkan masalah, dengan jalan musyawarah seperti halnya dalam pemecahan masalah dalam proses pemecahannya peserta didik mencari tahu solusi pemecahannya dengan cara menggali informasi melalui buku, bertanya ataupun berdiskusi dengan seseorang yang ahli dibidangnya. Dan dimasa presiden Jokowi Widodo baru sudah diimplementasikan perpindahan ibu kota yang baru dikarenakan kota Jakarta yang akan banjir ditahun 2050. Dan persepsi masyarakat Indonesia baik didesa pelosok berpendapat kinerja pemerintah yang tidak bagus dan tidak beres.

Sebagaimana yang kita ketahui masyarakat yang tinggal dipendesaan khususnya di medan estate memiliki banyak *problem* (masalah) dari hasil kinerja pemerintahan desa terkhususnya kepala desa di Medan Estate tersebut. Ketika penulis terjun ke lapangan ditanggal 07 april 2024 untuk bertemu masyarakat dimedan estate tersebut bahwasannya masyarakat di Medan Estate terbilang sulit mengerti perkataan saya. Karena mayoritas suku desa Medan Estate adalah suku batak, jadi ketika saya berbicara sama penduduk tersebut tidak begitu mengerti mereka karena menggunakan bahasa batak. Dan saya menyuruh mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, agar memudahkan untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan ketika saya berikan beberapa pertanyaan ke para penduduk di desa Medan Estate ada beberapa problem yang terjadi. Tapi saya mewawancarai tokoh masyarakat yang berpengaruh didesa Medan Estate yaitu bernama bapak Misdi. Bapak Misdi

berpendapat masalah yang terjadi di desa Medan Estate adalah pelayanan publik, pembangunan desa, kegiatan sosial dan keterbukaan informasi.

KERANGKA TEORI

Masyarakat adalah sekelompok orang yang berfungsi untuk meramaikan suatu desa dengan tujuan untuk membangun pemerataan keturunan disebuah desa tersebut. Selo Soemardjan berpendapat masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Dengan adanya masyarakat disuatu desa akan mendapatkan beberapa perubahan seperti membuat kearifan lokal yang baru, suatu tradisi, dan budaya yang baru.

Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok orang yang merancang sdm disuatu negara seperti pembangunan, pendidikan, dan penagihan pajak. menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer "Pemerintah" diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama. Jadi bisa penulis simpulkan tugas pemerintah tidaklah mudah dikarenakan banyak makian, celaan dari suatu masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah berfokus pada mewawancarai orang lain di lingkungan luar dan kompleks. (Moleong, 1999; Creswell, 2002, Lindloft, 1995), menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif lebih bersifat induktif. Artinya langkah penelitian yang harus didahulukan adalah data berdasarkan fakta, gejala, fenomena, realitas yang menjadi tema, kemudian diolah, diproses, sehingga akhir penelitian dapat menjadi proposisi, model atau bahkan teori. Penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa di desa Medan Estate.

Teknik pengumpulan data ialah teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitiannya. Menurut Sugiyono (2017,194) cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya. Dan penulis juga menggunakan teknik catat, yaitu dengan mencatat data-data atau informasi tentang hasil kinerja pemerintahan dari beberapa sumber refrensi seperti jurnal, buku nonfiksi, koran, tabloid dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pemberian angket kepada narasumber terkait penelitian artikel jurnal dengan judul artikel jurnal “ Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Medan Estate” sebagai berikut:

Nama: MISDI

Tanggal/Bulan/Tahun Lahir: PERNANTIAN, 31 DESEMBER 1978

Usia: 46 TAHUN

Pekerjaan: BURUH HARIAN LEPAS

Alamat:DUSUN II BULU REJO

No	Pernyataan	YA	TIDAK	NETRAL
1.	Dana desa yang dari pemerintah sebesar 20 miliar terimplementasikan untuk kebutuhan desa seperti pendidikan, event olahraga, dan masih banyak lagi.			√
2.	Menurut bapak Misdi, kinerja pemerintahan desa di desa Medan Estate sudah memuaskan bagi masyarakat dari awal dilantik sampai sekarang ini.			√
3.	Menurut bapak Misdi kinerja pemerintahan desa di Medan Estate seperti kepala desa pelayanan publik, keterbukaan informasi terkait BLT, dan lain-lain apakah mereka mempersulit bapak Misdi dan sekeluarga.	√		
4.	Menurut bapak Misdi pemerintahan desa di desa Medan Estate apakah ada riwayat korupsi, pelacur sama perempuan dan keburukan lainnya.	√		
5.	Menurut bapak Misdi, perangkat-perangkat pemerintahan desa sering rapat atau musyawarah yang tujuannya untuk mengevaluasi kekurangan apa saja didesa Medan Estate tersebut.	√		
6.	Menurut bapak Misdi, keluh kesah masyarakat di Medan Estate apabila ada pendapat dan kritik untuk membangun desa jauh lebih baik lagi, apakah kepala desa dan perangkat desa mendengarkan keluh kesah masyarakatnya dan memberikan solusi dan hasil kerja nyata dari kritikkan masyarakat atau cuman sekedar jadi pendapat angin lewat saja.	√		
7.	Menurut bapak Misdi, apakah ada pungli (pungutan liar) di perangkat desa Medan Estate untuk mempercepat administrasi masyarakat tersebut.			√
8.	Menurut bapak Misdi, Pemerintah desa telah mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa.	√		
9.	Menurut bapak Misdi, pemerintah desa selalu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.		√	

No	Pernyataan	YA	TIDAK	NETRAL
10.	Menurut bapak Misdi, Pemerintah desa berpendidikan paling rendah tamat sekolah SD, SMP, SMA dan UNIVERSITAS.			√

Pelayanan Publik Di Desa Medan Estate

Pelayanan publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat didesa seperti mengurus kartu tanda penduduk (KTP), mengurus kartu keluarga (KK), akta kelahiran dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal satu (1) Tentang Pelayanan Publik memberikan defenisi pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dan untuk pelayanan publik di desa Medan Estate terbilang netral karena masih ada bekerja yang malas dan rajin. Dan kata bapak Misdi alasannya karena bayaran pekerja diperangkat desa telat dibayar, kecil bayarannya dan perlakuan kepala desa ke perangkat desa yang tidak baik ke perangkat desa di Medan Estate.

Penulis mengusulkan diartikel jurnal ini ada beberapa masalah terkait pelayanan publik di desa-desa lain yang ada di Indonesia sebagai berikut:

1. Birokrasi Yang Terbelit-Belit

Pelayanan yang tidak baik dari prosedur awal sampai akhir seperti penerimaan BLT. Yang dimana masyarakat yang tidak bisa membaca, menulis dan mendengarkan informasi dengan baik disuruh untuk fotocopy berkas-berkas yang dibutuhkan cuman perkara Rp. 200.000.00 tetapi masyarakat bolak balik salah. Dan hal seperti ini yang menjadikan lingkaran setan dan menurut penulis seharusnya perangkat desa harus lebih memahami dan mempersiapkan masyarakat yang sdm rendah agar tidak terbuang uang masyarakat tersebut dan terkesan tidak rugi karena bolak balik salah di administrasi atau berkas terkait BLT.

2. Korupsi

Selalu ada pungutan liar (pungli) diperangkat kepala desa apabila mengurus berkas, uang dibayar awal semua akan beres. Jadi hal-hal seperti ini yang menghambat administrasi berkas didesa tersebut karena gara-gara oknum yang tidak bertanggung jawab. Wibowo (2013:22) menjelaskan bahwa korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang ada pada seseorang khususnya pejabat atau pegawai negeri, demi keuntungan pribadi, keluarga, rekanan, dan teman atau kelompoknya.

3. Kurangnya Layanan Yang Rendah

Perangkat desa sering kali memperlakukan masyarakat biasa dan tidak memanusiakan manusia seperti manusia PNS. Dan hal ini bertentangan sama sila ke 5 pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada letak keadilan Indonesia bagi masyarakat yang tidak PNS dan mereka tidak dilayakkan seperti manusia.

Pembangunan Desa Di Desa Medan Estate

Pembangunan desa adalah pondasi rumah yang ditinggalkan oleh manusia untuk beristirahat dan menetap sampai meninggal dunia. Menurut pendapat (Rochajat,dkk: 2011:3) pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Dengan adanya pembangunan yang baik akan meningkatkan sdm pembangunan yang akan maju lagi. Kalau saya kaitkan ke pembangunan kota jakarta, yang dimana pembangunan kota jakarta sudah merata dikepemimpinan gubernur anies baswedan selain pembangunan bapak anies membangun transportasi serba cepat seperti trans jakarta, kereta api MRT, kereta api KRL dan masih banyak lagi. Dan bisa penulis simpulkan bahwasannya pembangunan yang merata bisa diwujudkan dari pemimpin yang bijak, baik, berkompetensi, berkualitas dan jiwa kepemimpinanya yang baik.

Dari sisi pembangunan di desa Medan Estate sudah sangat merata, dikarenakan dana desa yang terimplementasikan dengan baik. Dan ketika saya melihat lingkungan di desa Medan Estate sudah terbilang maju, seperti dari infastruktur yang memadai, ekonomi yang kuat, masyarakat yang sejahtera, pemerintahan yang baik, dan kearifan lokal yang terjaga. Karena melihat pemimpin yang baik, bijak dan pintar mengelola dan desa dengan baik sudah layak kalau desa Medan Estate tersebut menjadi desa maju. Dari akses jalan sudah membaik, wifi gratis dikantor kepala desa, dan adanya event olahraga disetiap tahunnya diadakan. Menurut Wahjosumidjo, dalam praktek organisasi, kata “memimpin” mengandung konotasi menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, membina, memberikan teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan, dan sebagaimana.

Keterbukaan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa Di Desa Medan Estate

Dalam keterbukaan informasi di desa Medan Estate sudah memberikan pelayanan informasi yang terbuka, baik dan akurat. Informasi yang selalu diberikan perangkat desa berupa keluarkannya bantuan BLT, program dari presiden yang akan diberikan didesa tersebut dan biaya bantuan lainnya. (Yang & Maxwell, 2011) berpendapat keterbukaan informasi akan

mampu meningkatkan akurasi, efisiensi dan efektifitas kebijakan yang diambil oleh badan publik karena terjadinya interaksi atas pertukaran informasi yang dilakukan. Dan ada beberapa hal yang harus pembaca tau manfaat dari keterbukaan informasi dipemerintahan desa yaitu sebagai berikut:

1. Mencegah Terjadinya Korupsi dan Kolusi

Penulis berpendapat dengan adanya keterbukaan dalam menginformasikan dalam kinerja pemerintahan desa bakal mengurangi resiko terjadinya korupsi dan kolusi dalam suatu desa.

2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa

Seorang pemimpin yang berkualitas pasti akan memberikan dampak yang baik dan maju untuk kemajuan desa. Dan penulis yakin pemimpin yang baik, berkualitas, dan bijak akan memberikan dampak yang selektif dan produktif bagi masyarakat disuatu desa dan paham untuk memajukan desa yang tidak produktif. Menurut Wiradji seperti dikutip Rahmat (2003: 54), pengembangan masyarakat merupakan proses pembangunan kesadaran kritis yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, sistematis dan berkesinambungan melalui pengorganisasian dan peningkatan kemampuan menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk mengarah pada perubahan kondisi hidup yang semakin baik sesuai dengan cita-cita yang diharapkan.

3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Masyarakat yang *smart* (pintar) harus menanyakan program-program apa saja yang dijalankan oleh pemimpin berhasil menduduk kursi suatu pemerintahan desa. Terkadang begitu banyak seorang pemimpin yang menipu masyarakatnya dengan kepentingan dalam dirinya sendiri. Untuk melihat sifat dan karakter seorang pemimpin berikan dia kekuasaan dan kita bisa lihat sifat dan karakter asli dari seorang pemimpin tersebut. Dan tidak bisa kita bayangkan negara Indonesia yang banyak orang-orang pintar yang tidak diapresiasi oleh pemerintah dari hasil karya yang dia buat malah dibuang begitu saja dan diapresiasi oleh pemerintahan luar negeri. Sangat dirugikan dan buruk dimata kanca internasional negara Indonesia ini.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat dari hasil kinerja pemerintahan desa yang pastinya ada, karena banyak pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab dari hasil kinerja dirinya dia sendiri. Saya penulis artikel jurnal ini yang sebagai mahasiswa jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dan dari universitas negeri medan ini memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman saya ketika meneliti di desa Medan Estate dan harapan saya ke para pembaca mudah-mudahan artikel jurnal yang saya tulis ini memberikan banyak dampak perubahan di provinsi sumatera utara ini, bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik, pintar, bijak dan cerdas dapat membasmi para pemimpin-pemimpin yang korupsi yang ada di Indonesia ini. Dengan cara menulis artikel jurnal ini, adalah suatu hal kecil yang memberikan dampak kecil bagi para pembaca yang membaca artikel jurnal saya ini.

SARAN

Saran penulis terhadap persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa di Medan Estate. Harapan penulis mudah-mudahan desa Medan Estate bisa menjadi desa yang jauh lebih baik lagi, bibit siswa/i yang pintar, cerdas dan baik untuk kedepannya agar tercapai kecerdasan kehidupan bangsa di negara Indonesia. Karena dengan bagusnya kinerja pemerintah bibit kecil lahirnya masyarakat yang baik dan cerdas tidak langkah lagi, karena pemimpinnya yang baik dan bagus. Dan agar tercapainya negara Indonesia emas ditahun 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Belakang, A Latar. "Melvin I. Urofski, 2001, Naskah Pertama: Pendahuluan: Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi , Majalah Demokrasi, Departemen Informasi Internasional Amerika Serikat, Washington D.C., Hlm. 2. 1." : 1–13.
- Haryono, Tri Joko Sri. 2012. "Pengantar Antropologi." : 95.
- Ii, B A B, and Kerangka Teori. 2014. "BAB II KERANGKA TEORI 2.1 Pemerintahan Desa."
- Madekhan, Madekhan. 2019. "Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Reforma* 7(2): 62.
- Mujiono, Imam. 2018. "Kepemimpinan Dan Keorganisasian." *Kepemimpinan dan Keorganisasian* 53(9): 1689–99.
- Pandanwangi, Sanandya Silmi. 2018. "Usulan Nilai Relatif Jabatan Dengan Menggunakan Metode Poin Pada R.M Ayam Geprek Bu Sastro." *Journal of Applied Business Administration* 1: 1–197. <http://repository.unika.ac.id/17266/1>.
- Rahimallah, Muhammad Tanzil Aziz, and Ricky Ricky. 2023. "Keterbukaan Informasi Publik: Holistikasi Dan Akselerasi Good Governance." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12(2): 62–75.
- Rochajat, Rogers. 2011. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 2013. "Konsep

Pembangunan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 1689–99.

Saputra, Rendi. 2019. “Transparansi Pelayanan Publik Di Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 53(9): 10–39.

Aisyah. 2018. “Pengaruh Pendidikan Antikorupsi Terhadap Sikap Tanggungjawab Dan Kemampuan Berpikir Kritis Di Kelas V Sd Negeri 02 Pliken .” *Universitas Muhammadiyah Purwokerto* : 9.